

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DAN
KEBIJAKAN DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
(Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2022)

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S-1
Program Studi Akuntansi**



Disusun Oleh:

Moh Khoerul Umam

NIM: 31401700111

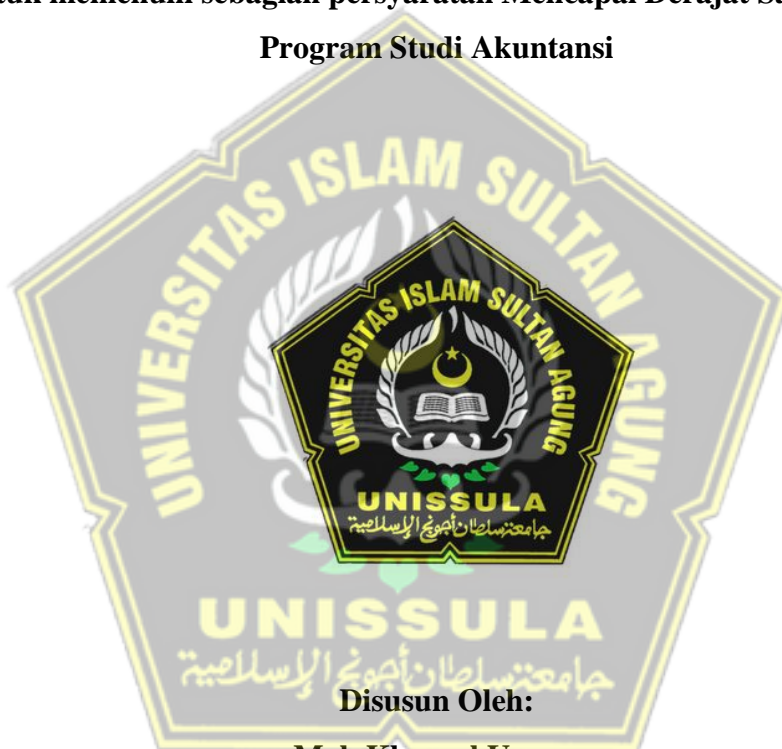
**FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DAN
KEBIJAKAN DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
(Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2022)

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S-1
Program Studi Akuntansi**



Disusun Oleh:

Moh Khoerul Umam

NIM: 31401700111

**FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

SKRIPSI

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DAN
KEBIJAKAN DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

(Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2022)

Disusun oleh :

Moh Khoerul Umam

NIM : 31401700111

Telah Disetujui Oleh Pembimbing dan Selanjutnya

Dapat Diajukan Kepada Sidang Panitia Ujian Penelitian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung

UNISSULA

Semarang, 27 Januari 2023

Pembimbing,



Devi Permatasari, SE., M.Si., Ak., CA

NIK. 211413024

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DAN
KEBIJAKAN DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
(Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2022)

Disusun oleh :

Moh Khoerul Umam

Nim : 31401700111


Telah dipertahankan di depan Penguji


Pada tanggal 1 Februari 2023

Susunan Dewan Penguji


Pembimbing

Penguji I


Devi Permatasari, SE., M.Si, Ak, CA
NIK. 211413024


Lisa Kartikasari, SE., M.Si, Akt., CA
NIK. 211402010

Penguji 2


Dr. H. M. Ja'far Shodiq, SE., S.Si., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA
NIK. 211498009

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal, 1 Februari 2023

Ketua Program Studi Akuntansi


Poovita Wijayanti, SE., M.si., AK., CA
NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Moh Khoerul Umam

NIM : 31401700111

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul **“Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan kebijakan desa terhadap pemberdayaan masyarakat”** adalah benar benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam penelitian skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 14 Januari 2023

Yang menyatakan



Moh Khoerul Umam

NIM : 31401700111

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya.

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al-Insyirah : 6-8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

“Allah SWT”

“Kedua orang tua dan keluarga”

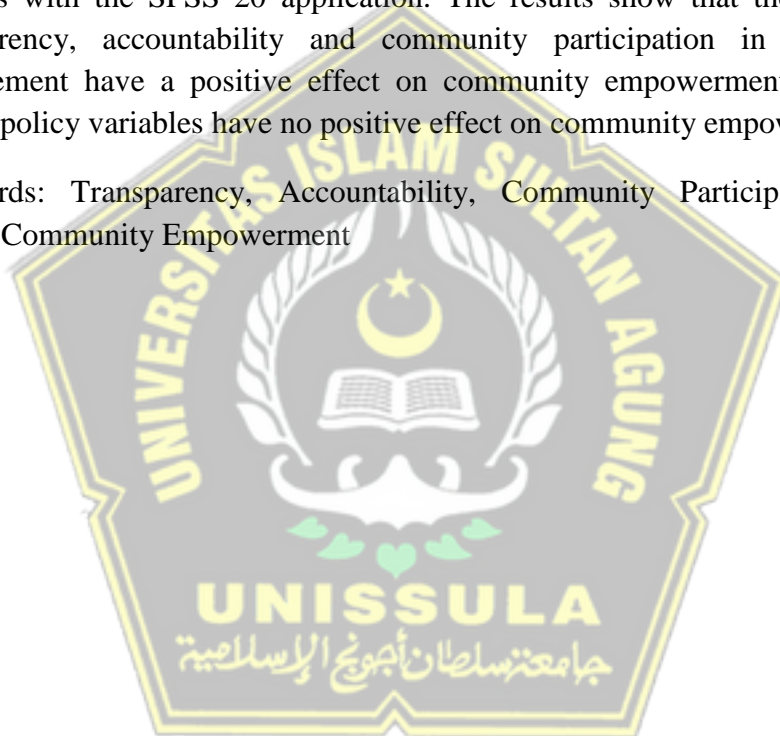
“Ibu Devi Permatasari, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini”

“Almamater Unissula”

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of transparency, accountability, community participation in the management of village funds and village policies on community empowerment. The method used in determining the sample in this study used a purposive sampling technique, data collection was carried out through a survey which was obtained by distributing questionnaires to respondents. Respondents in this study were the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, and KASI program with a total of 105 questionnaires distributed. The technique used to test the hypothesis is multiple linear regression analysis with the SPSS 20 application. The results show that the variables of transparency, accountability and community participation in village fund management have a positive effect on community empowerment. Meanwhile, village policy variables have no positive effect on community empowerment.

Keywords: Transparency, Accountability, Community Participation, village policy, Community Empowerment



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan kebijakan desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, pengumpulan data dilakukan melalui *survei* yang diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden. Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan KASI program dengan jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 105 kuesioner. Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Sedangkan variabel kebijakan desa tidak berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, kebijakan desa, Pemberdayaan Masyarakat



INTISARI

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu cara meningkatkan ketrampilan, kemampuan, serta meningkatkan sumber daya alam melalui penetapan peraturan, perencanaan kegiatan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat desa. Sebagai salah satu program pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan desa, pemerintah telah menggelyarkan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Dana desa tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan energi bagi desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Di samping itu keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang paling efektif untuk mencapai tujuan adalah dengan adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah desa. Pemberian dana desa yang cukup besar yang diterima setiap desa di Kecamatan Bonang masih belum cukup untuk mensukseskan pemberdayaan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi. Maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kebijakan desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat, sedangkan variabel kebijakan desa tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa dan Kebijakan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat”

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan orang-orang yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung “Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik” terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Devi Permatasari, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan baik dan memberi masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Kedua orang tua saya yang setia memberikan do'a, bantuan dan semangat selama penulis berkuliah di Universitas Islam Sultan Agung.

6. Segenap keluarga saya, kakak, adik serta saudara saya yang senantiasa memberikan do'a serta dukungan.
7. Teruntuk seorang wanita yang sedang menungguku, yang telah menemaniku dalam segala kondisi, yang telah membantuku melewati masa sulitku, memberikan support untuk selalu bangkit dan terus berkembang, juga berkat doa serta motivasi darinya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena adanya keterbatasan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Semarang, 14 Januari 2023



Moh Khoerul Umam

NIM. 31401700111

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
INTISARI.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory).....	12
2.2 Variabel – Variabel Penelitian.....	14
2.2.1 Pemberdayaan Masyarakat	14
2.2.2 Transparansi.....	17
2.2.3 Akuntabilitas.....	19
2.2.4 Partisipasi Masyarakat	23
2.2.5 Kebijakan Desa.....	25
2.3 Penelitian Terdahulu.....	26
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	30
2.5 Pengembangan Hipotesis	31

2.5.1 Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	31
2.5.2 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	32
2.5.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	33
2.5.4 Pengaruh Kebijakan Desa Terhadap PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Populasi dan Sampel	35
3.2.1 Populasi.....	35
3.2.2 Sampel	35
3.3 Sumber Data Penelitian	36
3.4 Metode Pengumpulan Data	36
3.5 Definisi Operasional Variabel dan Indikator.....	37
3.5.1 Variabel Dependen (Y).....	37
3.5.2 Variabel Independen (X)	38
3.6 Teknik Analisis.....	42
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	42
3.6.2 Uji Kualitas Data	42
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	43
3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda.....	45
3.6.5 Uji Hipotesis (uji t)	45
3.6.6 Uji Kebaikan Model.....	46
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	48
4.2 Uji Statistik Deskriptif Variabel.....	50
4.2.1 Deskripsi Variabel Transparansi.....	52
4.2.2 Deskripsi Variabel Akuntabilitas.....	53
4.2.3 Deskripsi Variabel Partisipasi Masyarakat	53
4.2.4 Deskripsi Variabel Kebijakan Desa.....	54
4.2.5 Deskripsi Variabel PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	55
4.3 Uji Kualitas Data	56

4.3.1 Uji Validitas	57
4.3.2 Uji Reliabilitas	58
4.4 Uji Asumsi Klasik	59
4.4.1 Uji Normalitas.....	60
4.4.2 Uji Multikolinearitas.....	60
4.4.3 Uji Heteroskedasitisitas	61
4.5 Analisis Regresi Linier Berganda.....	62
4.5.1 Model Regresi Linier Berganda.....	62
4.5.2 Uji t	65
4.6 Uji Kebaikan Model	67
4.6.1 Uji F	67
4.6.2 Koefesien Determinasi (R^2).....	67
4.7 Pembahasan	68
4.7.1 Pengaruh Transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.....	68
4.7.2 Pengaruh Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.....	70
4.7.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.....	71
4.7.4 Pengaruh Kebijakan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak	73
BAB V PENUTUP.....	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Keterbatasan Penelitian	76
5.3 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Besaran Alokasi Dana Desa yang Diterima Tiap Desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3. 1 Skor Skala Likert	37
Tabel 3. 2 Variabel dan Indikator	40
Tabel 4. 1 Penyebaran Kuesioner.....	48
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden	49
Tabel 4. 3 Deskripsi Variabel Transparansi.....	52
Tabel 4. 4 Deskripsi Variabel Akuntabilitas	53
Tabel 4. 5 Deskripsi Variabel Partisipasi Masyarakat	54
Tabel 4. 6 Deskripsi Variabel Kebijakan Desa	55
Tabel 4. 7 Deskripsi Variabel Pemberdayaan Masyarakat	56
Tabel 4. 8 Uji Normalitas.....	60
Tabel 4. 9 Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	61
Tabel 4. 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
Tabel 4. 11 Hasil Pengujian Validitas.....	57
Tabel 4. 12 Hasil Pengujian Realibilitas	59
Tabel 4. 13 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	63
Tabel 4. 14 Hasil Uji t.....	65
Tabel 4. 15 Hasil Uji F.....	67
Tabel 4. 16 Hasil Koefesien Determinasi	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Penelitian 31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	82
Lampiran 2. Tabulasi Data Responden	87
Lampiran 3. Analisis deskriptif variabel.....	100
Lampiran 4. Hasil Uji Validitas	103
Lampiran 5. Hasil Uji Realibilitas	107
Lampiran 6. Hasil Uji Asumsi klasik.....	108
Lampiran 7. Hasil Uji F	110
Lampiran 8. Hasil Uji R^2	110
Lampiran 9. Hasil Uji t.....	111
Lampiran 10. Surat Ijin Penelitian	112



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia Maryunani & Setyanti, (2020). Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada tanggal 15 Januari 2014 memberikan suatu harapan baru bagi masyarakat dan juga pemerintah desa. Dengan hadirnya undang-undang tersebut, kini masyarakat desa sudah diakui sebagai masyarakat hukum dan juga eksistensi desa telah diakui oleh negara

Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut UU no. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa diharapkan dapat memberikan desa sumber daya yang lebih banyak untuk berkembang dan memungkinkan mereka menjadi kuat, maju, dan mandiri, menjembatani kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal

72), yang disalurkan secara bertahap sebelum alokasi. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan yaitu Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Tingkat Kesulitan Geografis. (buku saku dana desa 2017). Dana desa itu sendiri dialirkan untuk pembangunan dan pemeliharaan diantaranya seperti: pembuatan jalan, prasarana Kesehatan, sarana prasarana Pendidikan dan kebudayaan, sarana prasarana usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, lumbung desa, pembuatan pupuk, dan pengembangan ternak. Dana desa juga mempunyai prioritas pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kapasitas masyarakat termasuk kelompok tani, kelompok nelayan dll. Juliana (2017)

Pemberdayaan masyarakat diantisipasi untuk meningkatkan sumber daya manusia, yang akan membuat masyarakat lebih kreatif dan aktif dalam menyediakan lapangan kerja atau meningkatkan ekonomi desa, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Putri et al., (2021). Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing Tahir, (2018).

Data yang didapatkan penulis dari Peraturan Bupati Demak No. 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Rincian dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021. Berikut tabel Rincian Dana Desa yang diperoleh setiap desa di Kecamatan Bonang.

Tabel 1. 1 Besaran Alokasi Dana Desa yang Diterima Tiap Desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021

No.	Nama Desa	Alokasi Dana Desa
1.	Jatimulyo	Rp. 1.024.106.000
2.	Krajanbogo	Rp. 1.180.359.000
3.	Sukodono	Rp. 1.146.095.000
4.	Sumberejo	Rp. 1.495.271.000
5.	Kembangan	Rp. 1.162.822.000
6.	Karangrejo	Rp. 1.546.691.000
7.	Gebangarum	Rp. 1.334.066.000
8.	Gebang	Rp. 1.499.567.000
9.	Margolinduk	Rp. 1.403.893.000
10.	Moro Demak	Rp. 1.719.540.000
11.	Purworejo	Rp. 2.377.191.000
12.	Betahwalang	Rp. 1.555.911.000
13.	Serangan	Rp. 1.029.247.000
14.	Tridonorejo	Rp. 1.657.206.000
15.	Tlogoboyo	Rp. 1.527.848.000
16.	Jatirogo	Rp. 1.157.128.000
17.	Bonangrejo	Rp. 1.088.567.000
18.	Poncoharjo	Rp. 1.258.733.000
19.	Wonosari	Rp. 1.141.373.000
20.	Jali	Rp. 1.018.178.000
21.	Weding	Rp. 1.614.011.000

Sumber : Peraturan Bupati Demak No. 1 Tahun 2021

Fenomena yang terjadi terkait dana desa yang diterima setiap desa di kecamatan Bonang yang merupakan penerima dana desa terbesar di Kabupaten Demak ternyata masih belum cukup untuk menurunkan angka kemiskinan di

Kecamatan Bonang, berdasarkan data dari dinsosp2pa Kabupaten Demak tercatat angka kemiskinan terbesar terjadi di kecamatan Bonang dengan jumlah 16.381 penduduk miskin. Tentunya hal tersebut menjadi kesenjangan kebijakan dalam pengelolaan anggaran yang diberikan.

Permasalahan lainnya yang ditemukan di salah satu desa di kecamatan Bonang yaitu desa Gebang bahwa dana yang diterima sebesar Rp. 1.499.567.000 oleh pemerintah desa tidak memberikan rincian penggunaan dana yang diterima di papan informasi maupun dalam bentuk banner yang dipasang di depan kantor desa. Sehingga program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak diketahui oleh seluruh masyarakat sebagai sasaran kebijakan dana desa.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah pusat sangat memperhatikan kebutuhan desa dengan memberikan kucuran dana yang begitu besar khususnya bagi masyarakat di kecamatan Bonang sebagai upaya meningkatkan perekonomian. Faktor yang mendorong penulis melakukan penelitian ini karena dalam pengelolaan dana desa di desa kecamatan Bonang masih belum memenuhi prinsip akuntabilitas. Mendapat alokasi dana paling besar namun masih menduduki peringkat tertinggi kemiskinan masih dipegang kecamatan Bonang. Tidak hanya itu keterbukaan dalam hal anggaran belum secara maksimal diterapkan dalam salah satu desa di Kecamatan Bonang.

Transparansi adalah pengertian dapat diaksesnya hak-hak publik untuk mendapatkan akses informasi yang akurat, dapat dipercaya dan tidak diskriminatif tentang struktur organisasi, sekaligus melindungi rahasia pribadi, golongan, dan

negara. Marta et al., (2021). Dalam penanganan uang desa, keterbukaan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perangkat desa bertindak dan/atau berperilaku sesuai dengan persyaratan hukum dan etika yang relevan, serta misi masyarakat. Dalam penelitian Putri et al., (2021) bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa mempengaruhi secara positif dan signifikan pada pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan penelitian Wardani & Utami, (2020) yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan dana desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *good governance* yang sangat diperhatikan saat ini. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan relevan serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Pemerintah desa harus memerintah sesuai dengan konsep akuntabilitas, dimana semua kegiatan akhir dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada (BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015). Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang mendasak tentang pengelolaan keuangan desa sebagai sarana untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari alokasi dana desa dalam rangka penguatan pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Marta et al., (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan nyata secara persial terhadap pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penelitian Dewi & Sapari, (2020)

menyatakan bahwa akuntabilitas alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu efektifitas inisiatif pembangunan dan pembangunan masyarakat desa. Tumbel, (2017). Keterlibatan masyarakat tidak hanya melibatkan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk setiap program pembangunan, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam mengenali isu dan peluang dalam masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2021) dampak pelibatan masyarakat dalam pengelolaan uang desa terhadap pemberdayaan masyarakat adalah baik. Menurut Dewi & Sapari, (2020) keterlibatan masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap pembangunan desa

Kebijakan pemerintah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, baik berupa program dan peraturan J. Sari, (2021). Kebijakan pemerintah desa merupakan barang hukum karena meskipun dalam skala kecil, setiap pemerintah memiliki yurisdiksi hukum atas wilayah administrasi desa (Sengaji & Asyik, 2018). Kebijakan desa adalah suatu kebijakan yang harus disusun oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desa yang tetap berada di bawah pengawasan pemerintah kota atau kabupaten. Di setiap komunitas, kebijakan yang dipilih harus berbeda. Ini karena standar yang diberlakukan dalam konteks pedesaan berbeda. Kemudian, setiap komunitas dapat menetapkan strateginya sendiri untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan desa. Sari & Mildawati, (2019). Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Syafi'i et al., (2018) menyatakan bahwa kebijakan desa

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penelitian Asyik, (2019) menyatakan bahwa kebijakan desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andriani, (2019) dan Putri et al., (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani, (2019) ialah pada variabel dependen dimana pada penelitiannya ini variabel dependennya adalah pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2021) ialah menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dengan populasi penelitian pada desa Songan B Kecamatan kintamani Kabupaten Bangli.

Sedangkan dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan kebijakan desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Dengan menambahkan variabel kebijakan desa pada penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana pemerintah desa mengoptimalkan anggarannya. Sehingga dengan adanya kebijakan ini, pemerintah desa dapat berhasil mencapai tujuan. Selain itu perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian, yang mana objek dalam penelitian adalah desa yang ada di kecamatan Bonang.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah 21 desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Kecamatan Bonang mempunyai sumber daya Manusia yang tinggi serta potensi sumber daya perikanan yang masih cukup besar tepatnya di

Desa Moro, Margolinduk dan Purworejo. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi mencerminkan bahwa tingkat keberdayaannya masih rendah. Dengan pengelolaan dana desa yang baik tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Bonang.

Penelitian ini menjelaskan dan menguji mengenai transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan kebijakan desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya masih terdapat perbedaan hasil maka topik ini menarik untuk diteliti kembali. Pada penelitian ini menggunakan populasi 21 desa di Kecamatan Bonang.

1.2 Rumusan Masalah

Pengelolaan dana desa yang baik dapat memberikan manfaat pada pemberdayaan masyarakat. Karena dengan meningkatkan sumber daya manusia akan menjadikan masyarakat memiliki kreatifitas dan aktif dalam usaha memperbaiki keadaan perekonomian, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan penelitian terdahulu membuktikan peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa memberi pengaruh positif pada kemajuan masyarakat apabila dikelola sesuai dengan asas keuangan desa. Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, yaitu Transparansi (Putri et al., 2021), (Wardani & Utami, 2020), Akuntabilitas (Marta et al., 2021), (Dewi & Sapari, 2020), Partisipasi Masyarakat (Shadrina, 2020), (Dewi & Sapari, 2020), kebijakan desa (Syafi'i et al., 2018) (Asyik, 2019).

Berdasarkan model hubungan antar variabel tersebut, maka rumusan permasalahan penelitian ini yaitu :

1. Apakah transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?
2. Apakah Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?
3. Apakah Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?
4. Apakah Kebijakan Desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi dalam pengelolaan dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kebijakan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan penelitian di atas, manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memberikan pengalaman dan wawasan dalam pengembangan kemampuan ilmiah khususnya pada penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Bagi Instansi yang bersangkutan

Sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Demak khususnya pada Desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan hubungan kontak antara pihak manajemen perusahaan (*Agents*) dengan pemilik perusahaan (*Principal*). *Agent* adalah orang yang disertai tanggung jawab untuk melakukan kegiatan atas nama pihak lain yang disebut prinsipal, sekaligus tunduk pada arahan prinsipal tersebut. Prinsipal adalah entitas yang memberikan izin kepada agen untuk melakukan tugas-tugas tertentu dan kemudian memantau kinerja agen dari tugas-tugas tersebut. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka agen akan bertindak dengan cara sesuai dengan kepentingan *principal* Putri et al., (2021).

Praktek pengelolaan keuangan dalam sektor publik merupakan konsep yang didasari oleh teori keagenan. Menurut Halim & Abdullah, (2009) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Teori tersebut menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan principal. Kerangka hubungan principal dan agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen – komitmen kebijakan publik. Dalam hal ini yang bertindak sebagai agen (memberi kewenangan) adalah kepala desa dan perangkat desa lainnya, sedangkan yang bertindak sebagai principal adalah pemerintah. Perangkat desa memiliki tugas untuk mempertanggungjawabkan

pengelolaan keuangan yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dan juga perangkat desa dituntut untuk memberikan transparansi kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut digunakan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dalam desa.

Menurut Eisenhardt (1989) dalam Hamdani, (2016) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu :

- 1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest)
- 2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality)
- 3) Manusia selalu menghindari resiko (risk averse)

Dari prinsip-prinsip tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa keagenan antara pejabat pemerintah dan konstituennya seringkali dipicu oleh karakteristik mendasar tersebut. Sering kali, kepentingan pribadi pejabat pemerintah yang mengendalikan perusahaan lebih diprioritaskan daripada peningkatan nilai organisasi atau pemerintah.

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah desa selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah kepada principal. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas

pengelolaan sumber daya Ismail et al., (2016). Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua aspek untuk mendukung keberhasilan kinerja pemerintah atau aparatur desa.

Menurut Putri et al., (2021) teori keagenan digunakan untuk mengetahui keberadaan perangkat desa sebagai organisasi pelayanan masyarakat yang merangkul dan mendengarkan aspirasi masyarakat, melayani masyarakat sebaik mungkin, dan mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang diserahkan kepada mereka. Dengan demikian, tujuan pemerintah desa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

2.2 Variabel – Variabel Penelitian

2.2.1 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Permendagri RI Nomor 7 tahun 2007 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 12 UU No. 6 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat pedesaan” adalah proses peningkatan keterampilan dan kemampuan serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui penetapan peraturan dan perencanaan kegiatan berdasarkan permasalahan yang ada. dan prioritas masyarakat desa. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mengubah anggota masyarakat menjadi manusia yang mandiri, mampu berpikir, bertindak, dan mengendalikan apapun yang mereka inginkan.

Menurut Mardikanto & Soebianto, (2017) mengungkapkan bahwa salah satu unsur yang memegang peran penting dalam organisasi adalah manusia. Berikut adalah lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :

- a) Bina manusia, merupakan upaya utama dalam pemberdayaan masyarakat. Kegiatannya meliputi pengembangan kapasitas individu, pengembangan kapasitas entitas, dan pengembangan kapasitas sistem.
- b) Bina usaha, merupakan upaya yang memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan.
- c) Bina lingkungan, yaitu upaya yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang masyarakat melalui penjagaan lingkungan hidup untuk lebih baik.
- d) Bina kelembagaan, yang dibutuhkan dalam kelembagaan pada pembangunan struktur perdesaan adalah sarana produksi dan peralatan pertanian, kredit produksi, pemasaran produksi, percobaan atau pengujian lokal, penyuluhan, dan transportasi.

Pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan dalam mensejahterakan masyarakat desa. Pembangunan desa adalah salah satu implementasi dari UU No.6 Tahun 2014 tentang desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsistensi, dan keberlanjutan dengan jalan fasilitas dan pendampingan. Pembangunan ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik saja akan tetapi juga pada non fisik, sumber daya manusia

adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan desa Dewi & Sapari, (2020).

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui tiga sisi yaitu sebagai berikut :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang (*enabling*). Secara khusus, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan tindakan sederhana seperti memberikan dukungan dan inspirasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang potensi masyarakat dan lingkungannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Setelah lingkungan atau iklim masyarakat berkembang, potensi asli masyarakat harus diperkuat, misalnya dengan memberikan masukan dan memfasilitasi akses ke berbagai kemungkinan yang akan memberdayakan masyarakat.
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Melindungi berarti mencegah daya saing yang tidak adil dan eksploitasi agresif terhadap yang rentan. Dengan demikian, tujuan pemberdayaan masyarakat bukan untuk membuat masyarakat bergantung pada organisasi filantropi yang berbeda (*charity*).

Lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu motivasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan, manajemen diri,

mobilitas sumber daya, dan pembangunan serta pengembangan jejaring (Mardikanto & Soebianto, (2017).

2.2.2 Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparency* yaitu prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Transparansi merupakan keterbukaan untuk mengakses sebuah informasi ekonomi maupun aktivitas yang ada pada program pemerintahan yang berhubungan dengan sumber daya publik (Dewi & Sapari, (2020).

Pemendagri Nomor 113 tahun 2014, mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip, prinsip transparansi menciptakan timbal balik antar masyarakat dengan pemerintah melalui penyedia informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dalam perangkat desa atau struktur perangkat desa merupakan hal yang sangat penting karena hal tersebut bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah kepada publik, selain itu sebagai usaha pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas kinerjanya (Putri et al., (2021).

Transparansi aparatur merupakan salah satu aktualisasi pada nilai dan prinsip-prinsip *good governance* dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Sasaran utama *good governance* adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang professional, kepastian hukum,

transparansi, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik, dan integritas pegabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara Kumalasari & Riharjo, (2016).

Transparansi harus terbuka dan siap menerima kritikan maupun masukan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mardiasmo, (2018) karakteristik dalam transparansi adalah sebagai berikut :

1. *Informativeness* (informatif)

Arus pemberian informasi, berita, prosedur, data, fakta, maupun penjelasan mekanisme kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi harus jelas dan akurat.

2. *Openness* (keterbukaan)

Keterbukaan informasi merupakan hak yang harus diperoleh oleh *stakeholder*. Sehingga setiap *stakeholder* dapat mengakses segala informasi dan data yang telah diungkapkan.

3. *Disclosure* (pengungkapan)

Pengungkapan yang relevan mencakup pengungkapan kegiatan dan kinerja keuangan kepada pemangku kepentingan. Ada dua jenis pengungkapan: pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan segala sesuatu yang

termasuk dalam tanggung jawab perusahaan, sebagaimana diamanatkan oleh standar akuntansi, prosedur operasi standar, dan persyaratan badan pengawas. Pengungkapan sukarela, bagaimanapun, mengacu pada informasi yang dilakukan di luar apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, standar akuntansi, dan peraturan badan pengawas.

Karena hanya pemerintah yang memiliki akses, transparansi dapat menurunkan jumlah ketidakpastian dalam penyelenggaraan proses pengambilan keputusan alokasi anggaran desa. Dengan tingkat keterbukaan ini, masyarakat akan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang disengaja. Wardani & Utami, (2020). Indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi menurut Hikmah, (2020) adalah ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Dengan demikian, transparansi merupakan konsep keterbukaan yang memberikan kemudahan akses dan pengetahuan kepada publik atas informasi keuangan. Oleh karena itu, dengan adanya transparansi akan menjamin bahwa publik memiliki akses yang tidak terbatas terhadap segala informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga hasil.

2.2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas sering disebut dalam bahasa Inggris sebagai "*accountability*" atau "*accountable*," yang keduanya berarti "dapat dipertanggungjawabkan." Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang untuk memastikan bahwa tugas dan

tanggung jawab telah dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan akuntabilitas adalah kinerja aparat pemerintah desa dari perencanaan hingga pemantauan kegiatan yang menggunakan anggaran dan harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan undang-undang. . Garung & Ga, (2020).

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah suatu bentuk pertanggungjawaban dari suatu pihak yang diberi kepercayaan oleh pemangku kepentingan, yang akan mengakibatkan berhasil atau tidaknya pihak tersebut dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut Ellwood (1993) dalam Pangesti & S, (2020) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

- 1) *Accountability for probity and legality* (akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum)

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas legal berkaitan dengan memastikan ditaatinya undang-undang dan aturan lain yang berkaitan dengan penggunaan sumber dana publik.

2) *Process accountability* (akuntabilitas proses)

Akuntabilitas proses berkaitan dengan kesesuaian sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan proses administrasi dalam kaitannya dengan metode yang digunakan untuk menyelesaikan tugas. Pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan hemat biaya merupakan perwujudan akuntabilitas proses.

3) *Program accountability* (akuntabilitas program)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4) *Policy accountability* (akuntabilitas kebijakan)

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan – kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo, (2018) akuntabilitas terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban yang hubungannya antara atasan kepada pemerintah pusat. Sedangkan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban yang bentuknya horizontal, yaitu kepada masyarakat.

Prinsip-prinsip akuntabilitas menurut Kumalasari & Riharjo, (2016) dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, sebagai berikut :

- a) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dengan pertanggungjawaban tersebut, kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya akan dinilai. Keberhasilan suatu organisasi dapat dievaluasi dalam hal akuntabilitas, seperti mengelola keuangan, rencana kerja terjadwal, dan aturan lain yang ditetapkan. Konsekuensinya, pertanggungjawaban ini akan menunjukkan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang bisa diawasi dan diatur oleh masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas adalah tercapainya tujuan dalam

pengelolaan dana desa, keterlibatan pemerintah, adanya monitoring pelaksanaan serta adanya penyusunan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

2.2.4 Partisipasi Masyarakat

Ini adalah semacam keterlibatan proaktif dalam suatu kegiatan atau partisipasi. Keterlibatan masyarakat, sementara itu, adalah aktivitas aktif masyarakat dalam inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mengatur dan mengevaluasi kinerja pemerintah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan Putri et al., (2021). Salah satu tujuan yang tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan masyarakat adalah dirancang sebagai alat untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat dalam hal pengambilan keputusan. Dalam situasi ini, masyarakat berperan aktif dalam memantau dan membentuk segala aspek pembangunan desa.

Salah satu hal yang menentukan efektivitas prakarsa pembangunan dan pengembangan masyarakat pedesaan di setiap desa adalah keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat melibatkan masyarakat tidak hanya dalam menentukan pilihan dalam setiap program pembangunan, tetapi juga dalam mengenali masalah dan potensi yang belum dimanfaatkan dalam masyarakat. Untuk membangun anggaran yang sukses, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam penganggaran, perencanaan, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Tumbel, (2017).

Menurut Solekhan, (2014) ada beberapa manfaat dengan adanya penerapan partisipasi masyarakat, yaitu :

- 1) Partisipasi dapat digunakan sebagai faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan yang penting, seperti perencanaan dan alokasi anggaran.
- 2) Terlibatnya masyarakat dan organisasi masyarakat dalam tata pemerintah dapat menjadi sumber adanya pendekatan-pendekatan dan program yang lebih inventif dan inovatif.
- 3) Keterlibatan kelompok marginal yang aktif berpotensi menjadi alat untuk menghasilkan program-program yang alternatif dan menghapus kebijakan yang bersifat diskriminatif.
- 4) Proses partisipasi berpotensi menjadi media komunikasi yang bias mengurangi adanya konflik dengan syarat forum dikelola sebagai forum deliberatif.

Menurut Holil (1980) dalam Bahtiar, (2017) terdapat empat faktor eksternal yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu :

- a) Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya dan antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem diluarnya.
- b) Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya baik dalam kehidupan, keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat.

- c) Kesempatan untuk berpartisipasi, keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan terjadinya partisipasi sosial.
- d) Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi, lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, dan budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

Selain itu adapun faktor internal yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu masyarakat itu sendiri yang berpengaruh pada sikap masyarakat tersebut untuk berpartisipasi.

2.2.5 Kebijakan Desa

Suatu kebijakan digambarkan sebagai kumpulan arahan dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam menjalankan suatu program untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, kebijakan desa merupakan produk hukum yang memiliki yurisdiksi hukum setiap pemerintah, meskipun hanya mencakup wilayah administratif desa itu sendiri M. T. Sari & Mildawati, (2019). Kebijakan pemerintah desa memiliki kekuatan hukum meskipun kecil, lokal, dan terbatas pada desa itu sendiri. Kebijakan desa berbentuk peraturan desa yang merupakan tindak lanjut dari perkembangan peraturan yang lebih tinggi, karena desa tidak berjalan sendiri-sendiri melainkan di bawah kekuasaan dan pengawasan kota atau kabupaten. Dewi & Sapari,(2020).

Kebijakan mengenai peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan masyarakat berhak ikut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam menentukan arah pembangunan nasional serta pembangunan desa sendiri.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa dan Kebijakan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat telah dilakukan oleh berbagai peneliti terdahulu. Berikut ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Christa Yunnita Garung, Linda Lomi Ga 2020	Variable independent : Akuntabilitas, Transparansi Variabel Dependent : Pengelolaan Alokasi dana desa	Metode penelitian deskriptif	Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa
2	Lasmi Yupita, Verni Juita	Variabel independent : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Metode penelitian deskriptif	Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana

	2020	<p>Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa</p> <p>Variabel dependent : Kesejahteraan Masyarakat</p>		<p>desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat</p> <p>Kelembagaan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat</p>
3	<p>Ade Ayu Anggreni Putri, I Wayan Sudiana, I Putu Deddy Samtika Putra</p> <p>2021</p>	<p>Variabel independent : Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi masyarakat</p> <p>Variabel dependen : Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>Metode penelitian asosiatif</p>	<p>Akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat</p> <p>Transparansi pengelolaan dana desa mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat</p> <p>Partisipasi masyarakat</p>

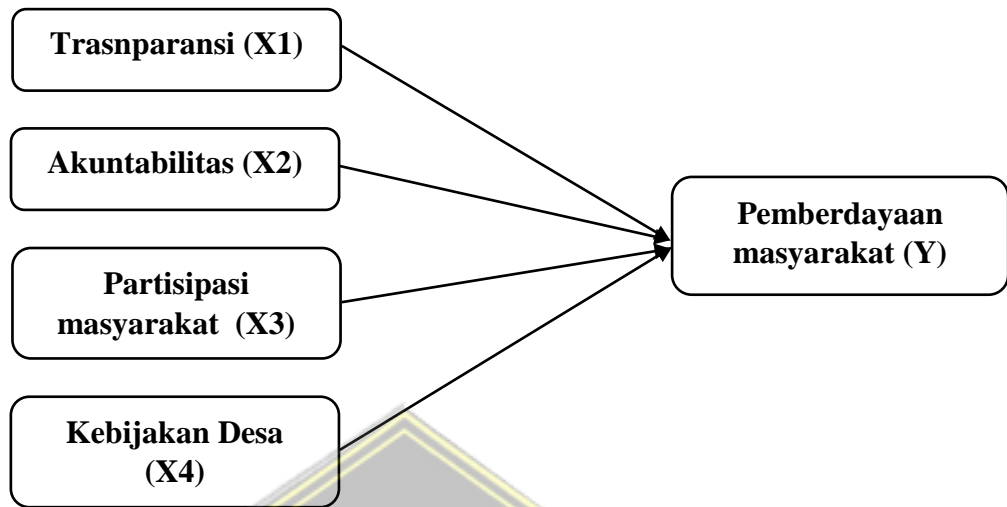
				dalam pengelolaan dana desa mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat
4	Rina Indrawati Syafi'I, Abdul Wahid Mahsuni, Afifudin. 2018	Variabel Independent : Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa, kelembagaan desa. Variabel dependent : pemberdayaan masyarakat	Metode penelitian deskriptif	Berpengaruh yang signifikan antara variabel Pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat. Berpengaruh yang signifikan antara variabel kebijakan desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel kelembagaan desa terhadap pemberdayaan masyarakat.
5	Filda Gean Rosiana Dewi,	Variabel independent : Akuntabilitas penggunaan	Metode penelitian	Akuntabilitas pengelolaan

	Sapari 2020	alokasi dana, Transparansi Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Variabel dependent : Pembangunan Desa	deskriptif	alokasi dana desa (ADD) tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa Transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa Kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa.
6	Intan Sengaji, Nur Fadrijh Asyik 2018	Variabel Independen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD, Kebijakan Desa Variabel Dependen:	Metode penelitian deskriptif	Akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD berpengaruh positif terhadap

		Pembangunan Desa		<p>pembangunan desa</p> <p>Kebijakan desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa</p>
--	--	------------------	--	---

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dari landasan teori dan kajian teoritis yang sudah dilakukan pada penelitian ini akan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya. Penerapan dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kebijakan desa akan membuat pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik karena penerapan prinsip ini dapat mengurangi penyelewengan dan pemborosan penggunaan dana desa. Sejalan dengan hal ini pemerintah mengharapkan adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kebijakan desa dalam pengelolaan keuangan desa karena aspek penting dalam menciptakan *good governance*, maka transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kebijakan desa berpengaruh langsung terhadap pemberdayaan masyarakat.



Gambar 2. 1
Model Penelitian

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Transparansi adalah terbukanya informasi kepada publik atau masyarakat dan masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi dari pemerintah jika masyarakat memerlukannya. Prinsip keterbukaan ini sangat penting karena keuangan desa dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat. Dengan adanya keterbukaan tersebut, dana desa dapat dikontrol dan diawasi dengan baik oleh yang berwenang serta dapat menimbulkan rasa kepercayaan publik kepada pemerintah. Sehingga dana desa yang

penggunaanya untuk pemberdayaan masyarakat dapat terwujud secara efektif dan tepat sasaran.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri et al.,(2021) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Diperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Marta et al., (2021) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan nyata secara persial terhadap pemberdayaan masyarakat. Maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat

2.5.2 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Akuntabilitas pada dana desa merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa selaku pelaku administrasi dan juga pengelola dana desa Putri et al., (2021). Akuntabilitas harus didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana upaya tersebut merupakan salah satu cara memberdayakan masyarakat, sehingga penggunaan dana desa dapat digunakan secara efektif, efisien dan terhindar dari kebocoran dan pemborosan dana.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syafi'i et al., (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Diperkuat oleh penelitian oleh Yupita & Juita,

(2020) yang menyatakan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut :

H2 : Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat

2.5.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan karena masyarakat mempunyai andil sebagai bentuk kemasyarakatan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat maka dapat menentukan pengaruh kebijakan dalam pemanfaatan keuangan desa, sehingga masyarakat mampu mengawasi dan mengontrol program yang dilakukan sebagai realisasi keuangan desa yang telah diterima. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan ikut dalam proses perencanaan maupun penyampaian pendapat kepada pemerintah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Diperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Marta et al., (2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan nyata secara persial terhadap pemberdayaan masyarakat, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut :

H3 : Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat

2.5.4 Pengaruh Kebijakan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Desa berhak menguasai dan mengurus rumahnya sendiri; dalam hal ini, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maju, dan berhasil. Oleh karena itu, pemerintah desa memberikan otonomi kepada desa dengan memberikan kewenangan pengambilan kebijakan terhadap desa, khususnya dalam hal memberikan pelayanan, memperluas peran, dan memungkinkan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya sendiri.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syafi'i et al., (2018) menyatakan bahwa kebijakan desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Diperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Yupita & Juita, (2020) menyatakan bahwa Kebijakan Desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut :

H4 : Kebijakan desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif atau penelitian ini disajikan dengan menggunakan angka-angka dan menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau hingga sekarang. Menurut Sugiyono, (2019) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi menurut Sugiyono, (2019) merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 21 Desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono, (2019) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang diambil oleh populasi tersebut, sampel diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili). Penelitian ini menggunakan teknik purposive

sampling, yaitu suatu bentuk purposeful sampling yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, meliputi ciri, karakteristik, dan kriteria sampel tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut maka populasi penelitian ini terdiri dari aparatur dan pejabat dari tim pengelola dana desa atau yang ditunjuk oleh kepala desa untuk mengelola dana desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan dua orang program KASI. Kemudian, di setiap desa, lima individu akan disurvei.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung kepada pengumpul data Sugiyono, (2019). Sedangkan sumber data pada penelitian ini adalah data atau informasi yang diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada pemerintah desa di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survey lapangan dengan cara menyebarkan kuesioner ke sejumlah responden potensial yaitu pemerintah desa Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab Sugiyono, (2019).

Pengisian kuesioner dalam penelitian ini yaitu menggunakan *skala likert*, *skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial Sugiyono, (2019). Kriteria

penilaian jawaban dalam kuesioner yaitu setiap item jawaban pada skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Jawaban itu juga diberi skor sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skor Skala Likert

STS	TS	KS	S	SS
1	2	3	4	5

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

KS : Kurang setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Indikator

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau variabel independent Sugiyono, (2019). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat dapat didefinisikan sebagai strategi untuk membangun dan mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan masyarakat Putri et al., (2021). Indikator yang digunakan untuk mengukur pemberdayaan masyarakat ada tiga indikator yang digunakan yaitu :

- a) Kemampuan
- b) Kepercayaan
- c) Wewenang
- d) Tanggung jawab.

3.5.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat atau variabel dependen Sugiyono, (2019). Variabel independen pada penelitian ini adalah Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat.

1. Transparansi

Transparansi merupakan akses ke informasi dan kegiatan ekonomi dalam program pemerintah yang berkaitan dengan sumber daya publik difasilitasi oleh transparansi. Humaeroh et al., (2022). Indikator yang digunakan untuk mengukur Transparansi adalah :

- a) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b) Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c) Keterbukaan proses
- d) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kinerja perangkat pemerintah desa, mulai dari perencanaan anggaran hingga pengawasan anggaran, yang harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan undang-undang. Sugista, (2017). Indikator yang digunakan untuk mengukur Akuntabilitas adalah :

- a) Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa
- b) Pengawasan oleh tim pelaksana
- c) Adanya laporan pertanggungjawaban.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam prakarsa pemerintah yang dirancang untuk mengatur dan mengevaluasi kinerja pemerintah guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Mada et al., (2017). Indikator yang digunakan untuk mengukur Partisipasi Masyarakat adalah :

- a) Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan
- b) Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan
- c) Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil
- d) Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan penilaian hasil

4. Kebijakan desa

Kebijakan desa adalah prinsip panduan yang ditetapkan oleh badan pemerintahan sebelum pelaksanaan rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan yang berhasil dilaksanakan berusaha untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan itu sendiri dan yang dapat dicapai melalui kinerja implementasi. Dewi & Sapari, (2020). Indikator yang digunakan untuk mengukur kebijakan desa :

- a) Akses
- b) Ketepatan layanan
- c) Kesesuaian program dengan kebutuhan

Tabel 3. 2 Variabel dan Indikator

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Pemberdayaan Masyarakat (Y)	a) Kemampuan	Kemampuan dan pengetahuan masyarakat menggunakan teknologi	(Putri et al., 2021)
		b) Kepercayaan	Kesempatan berpartisipasi	
		c) Wewenang	Kesempatan bekerja sama	
			Terlibat dalam pengambilan keputusan	
d) Tanggung jawab	Masyarakat diberikan tanggung jawab mengenai pengelolaan dana desa			

			Berani mengambil keputusan	
2.	Transparansi (X1)	a) aksesibilitas dokumen	Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen	Humaeroh et al., (2022)
		b) Kejelasan	Kejelasan dan kelengkapan informasi	
		c) terbuka	Keterbukaan Proses	
		d) kerangka regulasi	Kerangka regulasi yang menjamin transparansi	
3.	Akuntabilitas (X2)	a) Akuntabilitas Program	Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa	Sugista, (2017)
		b) Akuntabilitas Kinerja	Pengawasan oleh tim pelaksana	
		c) Akuntabilitas kebijakan	Adanya laporan pertanggungjawaban	
4.	Partisipasi Masyarakat (X3)	a) Perencanaan	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan	Mada et al., (2017)
		b) Pelaksanaan	Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan	
		c) Penerimaan dan manfaat hasil	Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan dan manfaat hasil	
		d) Pengawasan dan penilaian hasil	Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan	
			Keterlibatan Masyarakat Dalam Penilaian Pelaksanaan Anggaran	
5	Kebijakan Desa (X4)	a) Akses	Program atau pelayanan mudah dijangkau	Dewi & Sapari, (2020)
		b) Ketepatan layanan	Pelayanan yang diberikan dari penerapan suatu program dilakukan tepat waktu	
		c) Kesesuaian program dengan kebutuhan	Kebijakan atau program yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	

3.6 Teknik Analisis

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan Sugiyono, (2019). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS (*Statistical Program For Social science*) versi 25 dengan tujuan mendapat hasil perhitungan yang akurat dan mempermudah dalam melakukan pengolahan data, sehingga lebih cepat dan tepat.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali, (2018) Analisis Statistik Deskriptif merupakan teknik analisis yang menggambarkan atau mendeskripsikan data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), standard deviasi, sum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait variabel penelitian melalui data yang dikumpulkan. Analisis deskriptif yang digunakan adalah nilai minimum, maksimum, mean, dan standard deviasi.

3.6.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan persamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Uji validitas

digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika kuesioner tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur Sugiyono, (2019). Jika suatu nilai signifikan $<$ dari $\alpha = 0,05$ maka dapat dikatakan valid, sedangkan jika suatu nilai signifikan $>$ dari $\alpha = 0,05$ maka dapat dikatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas mengukur konsistensi dan stabilitas data atau hasil Sugiyono (2019). Data yang tidak reliabel tidak dapat terus diproses karena tidak dapat diandalkan dan akan menghasilkan hasil yang bias. Keandalan suatu alat ukur ditentukan oleh konsistensi pengukuran sepanjang waktu. Jika nilai Cronbach Appha $>$ 0,60, maka sistem dapat diandalkan; jika $<$ 0,60, sistem tidak dapat diandalkan.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual terdistribusi normal dalam model regresi. Cara melihat suatu model regresi telah terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov Ghozali, (2018). Data dikatakan diterima, apabila nilai signifikan lebih besar 0,05 pada ($P > 0,05$). Sebaliknya, data dikatakan ditolak, apabila nilai signifikan lebih kecil 0,05 pada ($P < 0,05$).

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara variabel independent pada suatu model regresi. Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independent Ghozali, (2018). Jika variabel independent saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak orthogonal. Multikolinearitas dilihat dari nilai Tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 menunjukkan adanya multikolinearitas. Apabila nilai tolerance $\geq 0,10$ atau sama dengan VIF ≤ 10 menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan variance dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi Heteroskedastisitas atau yang Heteroskedastisitas Ghozali, (2018). Untuk menguji Heteroskedastisitas menggunakan uji glejser, jika nilai signifikansinya $> 0,05$ maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai signifikansinya $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji Heteroskedastisitas juga bisa dengan melihat grafik plot pada grafik scatterplot. Jika penyebaran tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda ini digunakan untuk mengukur apakah ada hubungan antara lebih dari satu variabel bebas pada variabel terikat Ghozali, (2018). Dalam penelitian ini analisis regresi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Adapun persamaan analisis regresi linier sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y	=	Pemberdayaan Masyarakat
β_1 - β_4	=	Koefisien regresi untuk masing – masing variable independen
X1	=	Transparansi
X2	=	Akuntabilitas
X3	=	Partisipasi Masyarakat
a	=	Konstanta
ε	=	Standart error

3.6.5 Uji Hipotesis (uji t)

Uji statistic T digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable independent secara individu dalam menerangkan variable independent Ghozali, (2018). Dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka kriteria pengujian atau dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- a) Apabila nilai signifikansi $t < 0,05$, maka H_a diterima, artinya bahwa variable independent secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Apabila nilai signifikansi $t > 0,05$, maka H_a ditolak, artinya bahwa variable independent secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.6 Uji Kebaikan Model

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji Statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan semua variabel bebas dimasukan dalam model yang memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel terikat Ghazali, (2018). Kriteria pengujian menggunakan tingkat signifikan 0,05. Jika P Value $< 0,05$ maka hipotesis diterima begitu juga sebaliknya, jika P Value $> 0,05$ maka hipotesis ditolak.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (adjusted R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan nilai antara nol sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memngukur variasi variabel dependen. Sebaliknya, nilai koefisian determinasi yang kecil menandakan kemampuan variabel

independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas Ghozali, (2018).



BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 21 Desa, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Data penelitian dilakukan dengan cara membagikan kuesioner secara langsung dan secara online menggunakan google form. Hasil yang diisi oleh responden yaitu 105 kuesioner yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Dengan responden di kecamatan Bonang yaitu 21 desa dengan 5 responden per satu desa ($21 \times 5 = 105$ responden). Adapun gambaran data kuesioner responden sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Penyebaran Kuesioner

No	Kuesioner	Jumlah
1	Kuesioner yang disebar	105
2	Kuesioner yang tidak kembali	0
3	Kuesioner yang kembali	105
4	Kuesioner yang tidak lengkap	0
5	Kuesioner yang dapat diolah	105
Respon Rate = $105/105 \times 100\%$		100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 penyebaran kuesioner menghasilkan 105 sampel ini dikelompokkan menurut umur responden, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir dan jabatan. Data yang tersedia kemudian di tabulasikan dan disajikan dengan statistik deskriptif sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin :		
Laki-laki	88	83,8%
Perempuan	17	16,2%
Umur :		
≤ 25 Tahun	4	3,8%
26 - 35 Tahun	52	49,5%
36 - 45 Tahun	21	20%
46 - 55 Tahun	19	18,1%
≥ 56 Tahun	9	8,6%
Pendidikan Terakhir:		
SMP	0	0%
SMA/SMK	47	44,8%
DIPLOMA	6	5,7%
S1	50	47,6%
S2	2	1,9%
Agama:		
Islam	105	100%
Kristen	0	0%
Budha	0	0%
Jabatan :		
Kepala Desa	21	20%
Sekretaris	21	20%
Bendahara	21	20%
KASI Program	42	40%

Sumber : data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 terdapat 105 responden di 21 desa, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak yang menjadi sampel pada penelitian ini. Sampel tersebut

dipilih karena telah memenuhi semua kriteria yang telah ditentukan sesuai kebutuhan analisis penelitian, dapat dilihat dari tabel diatas berdasarkan jenis kelamin, umur, agama, pendidikan terakhir serta jabatan maka peneliti menguraikan penjelasan karakteristik responden, diantaranya :

Berdasarkan jenis kelamin, responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini terdiri dari 88 laki-laki (83,8%) dan 17 responden perempuan (16,2%).

Berdasarkan kelompok usia, usia responden yang berumur ≤ 25 tahun yaitu sebanyak 4 orang (3,8%), umur 26-35 tahun sebanyak 52 orang (49,5%), umur 36-45 tahun sebanyak 21 orang (20%) umur 46-55 tahun sebanyak 19 orang (18,1%) dan umur ≥ 56 tahun sebanyak 9 orang (8,6)

Berdasarkan kelompok pendidikan terakhir SMP sebanyak 0 orang (0%), SMA/SMK sebanyak 47 orang (44,8%), DIPLOMA sebanyak 6 orang (5,7%), S1 sebanyak 50 orang (47,6) dan S2 sebanyak 2 orang (1,9%).

Berdasarkan kelompok agama Islam sebanyak 105 orang (100%) sedangkan agama Kristen, Budha sebanyak 0 orang (0%)

Berdasarkan kelompok jabatan kepala desa, sekretaris dan bendahara sebanyak 21 orang (20%) sedangkan untuk KASI Program sebanyak 42 orang (40%).

4.2 Uji Statistik Deskriptif Variabel

Analisis deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui gambaran deskriptif dari responden mengenai variabel – variabel yang digunakan pada penelitian ini.

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis indeks yang memiliki tujuan untuk menggambarkan persepsi responden dari item pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Menurut Ferdinan, (2006) teknik skoring yang dilakukan dalam penelitian ini adalah minimum 1 dan maksimum 5, maka didapatkan rumus indeks perhitungan atas jawaban responden adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Indeks} = (F1 \times 1) + (F2 \times 2) + (F3 \times 3) + (F4 \times 4) + (F5 \times 5)$$

Dimana F1 F1 adalah Frekuensi dari responden yang menjawab 1, F2 adalah frekuensi responden yang menjawab 2 dan seterusnya sampai F5 untuk frekuensi yang menjawab 5 dari skor yang digunakan pada daftar pertanyaan. Oleh sebab itu angka jawaban responden tidak dimulai dari angka 0 akan tetapi dimulai dari angka 1 sampai 5, maka indeks yang didapatkan akan dimulai dari angka 10 hingga 100 dengan rentang sebesar 90 sehingga perhitungan *Three-box Method* (kerangka tiga kotak) dalam menentukan indeks persepsi responden terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rentang 90 dibagi tiga menghasilkan rentang sebesar 30 yang akan digunakan sebagai dasar interpretasi nilai indeks adalah sebagai berikut :

$$10 - 40 = \text{Rendah}$$

$$41 - 70 = \text{Sedang}$$

$$71 - 100 = \text{Tinggi}$$

4.2.1 Deskripsi Variabel Transparansi

Berikut adalah hasil tanggapan responden terhadap variabel transparansi

Tabel 4. 3 Deskripsi Variabel Transparansi

No	Indikator	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	STS (5)	Indeks
		F	F	F	F	F	
1	X1.1	0	2	17	45	41	88
2	X1.2	0	5	13	51	36	86,6
3	X1.3	0	2	22	38	43	82
4	X1.4	0	0	23	44	38	87
5	X1.5	0	2	26	37	40	86
6	X1.6	0	3	28	41	33	83,8
7	X1.7	0	4	22	44	35	85
8	X1.8	0	5	16	43	41	87
Jumlah							85,6

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Dari tabel 4.3 hasil deskripsi variabel transparansi menunjukkan bahwa pengaruh dari transparansi terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu tinggi. Hal ini di buktikan dengan hasil rata – rata yang diperoleh dari responden dengan rentang 10 – 100 indeks yang diperoleh sebesar 85,6. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh variabel transparansi, akan tetapi sebagian besar dipengaruhi juga oleh variabel diluar transparansi.

4.2.2 Deskripsi Variabel Akuntabilitas

Berikut adalah hasil tanggapan responden terhadap variabel akuntabilitas :

Tabel 4. 4 Deskripsi Variabel Akuntabilitas

No	Indikator	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)	Indeks
		F	F	F	F	F	
1	X2.1	0	4	24	49	28	83,2
2	X2.2	0	1	23	49	32	85,4
3	X2.3	0	2	24	41	38	86
Jumlah							84,86

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Dari tabel 4.4 hasil deskripsi variabel akuntabilitas menunjukkan bahwa pengaruh dari akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu tinggi. Hal ini di buktikan dengan hasil rata – rata yang diperoleh dari responden dengan rentang 10 – 100 indeks yang diperoleh sebesar 84,86. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas, akan tetapi sebagian besar dipengaruhi juga oleh variabel diluar akuntabilitas.

4.2.3 Deskripsi Variabel Partisipasi Masyarakat

Berikut adalah hasil tanggapan responden terhadap variabel Partisipasi Masyarakat :

Tabel 4. 5 Deskripsi Variabel Partisipasi Masyarakat

No	Indikator	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)	Indeks
		F	F	F	F	F	
1	X3.1	0	1	18	39	47	89,4
2	X3.2	0	1	25	38	41	86,8
3	X3.3	0	2	17	40	46	89
4	X3.4	0	1	17	47	40	88,2
5	X3.5	0	0	28	37	39	85,4
6	X3.6	0	3	18	39	45	88,2
Jumlah							87,83

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Dari tabel 4.5 hasil deskripsi variabel partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa pengaruh dari partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu tinggi. Hal ini di buktikan dengan hasil rata – rata yang diperoleh dari responden dengan rentang 10 – 100 indeks yang diperoleh sebesar 87,3. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh variabel partisipasi masyarakat, akan tetapi sebagian besar dipengaruhi juga oleh variabel diluar partisipasi masyarakat.

4.2.4 Deskripsi Variabel Kebijakan Desa

Berikut adalah hasil tanggapan responden terhadap variabel Kebijakan Desa :

Tabel 4. 6 Deskripsi Variabel Kebijakan Desa

No	Indikator	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)	Indeks
		F	F	F	F	F	
1	X4.1	0	0	17	52	36	87,8
2	X4.2	0	2	14	47	42	88,8
3	X4.3	0	3	20	45	37	86,2
Jumlah							87,6

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Dari tabel 4.6 hasil deskripsi variabel kebijakan desa menunjukkan bahwa pengaruh dari kebijakan desa terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu tinggi. Hal ini di buktikan dengan hasil rata – rata yang diperoleh dari responden dengan rentang 10 – 100 indeks yang diperoleh sebesar 87,6. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh variabel kebijakan desa, akan tetapi sebagian besar dipengaruhi juga oleh variabel diluar kebijakan desa.

4.2.5 Deskripsi Variabel Pemberdayaan Masyarakat

Berikut adalah hasil tanggapan responden terhadap variabel pemberdayaan masyarakat :

Tabel 4. 7 Deskripsi Variabel Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)	Indeks
		F	F	F	F	F	
1	Y1	0	0	13	46	46	90,6
2	Y2	0	6	15	51	33	85,2
3	Y3	0	1	25	40	39	86,4
4	Y4	0	1	20	45	39	87,4
5	Y5	0	1	31	31	35	78,8
6	Y6	0	1	29	39	36	85
7	Y7	0	4	20	44	37	79,8
Jumlah							84,74

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Dari tabel 4.7 hasil deskripsi variabel pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yaitu tinggi. Hal ini di buktikan dengan hasil rata – rata yang diperoleh dari responden dengan rentang 10 – 100 indeks yang diperoleh sebesar 84,74. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa pemberdayaan masyarakat dengan indeks responden yang tinggi.

4.3 Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data dimaksudkan untuk menghindarkan adanya bias yang diperoleh dari penelitian dalam menjelaskan konstruk variabel yang akan diukur. Uji kualitas data meliputi uji validitas dan uji realibilitas instrumen.

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Adapun pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$ maka dapat dikatakan valid dan apabila $R_{hitung} < R_{tabel}$ maka dapat dikatakan tidak valid. Selain itu, Jika suatu nilai signifikan $<$ dari $\alpha = 0,05$ maka dapat dikatakan valid, sedangkan jika nilai signifikan $>$ dari $\alpha = 0.05$ maka dapat dikatakan tidak valid. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Pengujian Validitas

No	Variabel			
1	Transparansi	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
1		0,595	0,1918	Valid
2		0,594	0,1918	Valid
3		0,629	0,1918	Valid
4		0,600	0,1918	Valid
5		0,570	0,1918	Valid
6		0,584	0,1918	Valid
7		0,519	0,1918	Valid
8		0,661	0,1918	Valid
2	Akuntabilitas	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
1		0,708	0,1918	Valid
2		0,698	0,1918	Valid
3		0,710	0,1918	Valid
3	Partisipasi Masyarakat	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
1		0,597	0,1918	Valid
2		0,677	0,1918	Valid
3		0,688	0,1918	Valid

	4	0,656	0,1918	Valid
	5	0,710	0,1918	Valid
	6	0,639	0,1918	Valid
4	Kebijakan Desa	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
	1	0,729	0,1918	Valid
	2	0,757	0,1918	Valid
	3	0,785	0,1918	Valid
5	Pemberdayaan Masyarakat	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
	1	0,521	0,1918	Valid
	2	0,533	0,1918	Valid
	3	0,670	0,1918	Valid
	4	0,606	0,1918	Valid
	5	0,528	0,1918	Valid
	6	0,574	0,1918	Valid
	7	0,477	0,1918	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan sebagai item yang valid karena memiliki nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$ maka dinyatakan valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas mengukur konsistensi dan stabilitas data atau hasil Sugiyono (2019). Data yang tidak reliabel tidak dapat terus diproses karena tidak dapat diandalkan dan akan menghasilkan hasil yang bias. Keandalan suatu alat ukur ditentukan oleh konsistensi pengukuran sepanjang waktu. Jika nilai Cronbach Alpha $> 0,60$, maka sistem dapat diandalkan; jika $< 0,60$, sistem tidak

dapat diandalkan. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel yang diringkas pada tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4. 9 Hasil Pengujian Realibitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Transparansi	0,737	Reliabel
Akuntabilitas	0,776	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,742	Reliabel
Kebijakan Desa	0,627	Reliabel
Pemberdayaan Masyarakat	0,629	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Dari hasil tabel 4.12 menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien Alpha yang lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur pada variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reliabel.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menilai keakuratan nilai parameter yang diperoleh dari model yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan strategi analisis regresi linier yang harus terbebas dari persoalan divergensi asumsi klasik. Uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas merupakan uji asumsi yang sering digunakan. Hasil pengujian pengaruh asumsi klasik dapat disajikan sebagai berikut :

4.4.1 Uji Normalitas

Pengujian asumsi normalitas dilakukan untuk variabel secara individual dan juga pengujian untuk model regresi. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan uji normalitas Kolmogrov-Smirnov. Hasil pengujian normalitas secara dapat dilihat pada tabel pengujian berikut ini :

Tabel 4. 10 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.59892425
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.092
	Negative	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z		.941
Asymp. Sig. (2-tailed)		.339

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data primer yang diolah,2022

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai dari hasil asymp.sig. (2-tailed) adalah 0,339 artinya > dari nilai 0,05 maka dapat disimpulkan data penelitian ini berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah model regresi mengungkapkan adanya keterkaitan antar variabel bebas. Variabel independen tidak boleh dikorelasikan dalam model regresi yang andal. Pengujian

multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF. Uji multikolinearitas dilakukan pada model regresi. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel	Uji		Keterangan
	Toerance	VIF	
Transparansi	0,710	1,409	Bebas Multikolinearitas
Akuntabilitas	0,780	1,282	Bebas Multikolinearitas
Partisipasi Masyarakat	0,883	1,132	Bebas Multikolinearitas
Kebijakan Desa	0,981	1,019	Bebas Multikolinearitas

Sumber : Data primer yang diolah,2022

Berdasarkan hasil tabel 4.9 menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai tolerance diatas 0,10 sedangkan nilai VIF mempunyai nilai dibawah 10 sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel-variabel yang digunakan tidak mengandung masalah multikolinearitas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas penelitian ini mencoba untuk mengetahui apakah residual observasi model regresi memiliki varians yang tidak merata. Model regresi yang layak menunjukkan homoskedastisitas atau tidak memiliki heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi Spearman. Jika nilai signifikan melebihi 0,05 maka disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	<i>sig</i>	Alpha	Kesimpulan
Transparansi	0,520	0,05	Tidak Ada Heteroskedastisitas
Akuntabilitas	0,982	0,05	Tidak Ada Heteroskedastisitas
Partisipasi Masyarakat	0,463	0,05	Tidak Ada Heteroskedastisitas
Kebijakan Desa	0,692	0,05	Tidak Ada Heteroskedastisitas

Sumber : data primer yang diolah,2022

Berdasarkan hasil tabel 4.10 pengujian heteroskedastisitas dengan teknik uji gletser menunjukkan bahwa semua variabel menunjukkan $> 0,05$. Hal ini berarti bahwa model regresi tidak ada gejala heteroskedastisitas.

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi linier, yaitu harus bebas dari kesulitan divergensi asumsi klasik, memiliki data normal, bebas multikolinearitas, dan bebas heteroskedastisitas. Dari penelitian sebelumnya telah ditentukan bahwa model persamaan yang diberikan dalam penelitian ini memenuhi kriteria asumsi klasik; karenanya, model ini dianggap valid. Hasil pengujian pengaruh asumsi klasik dapat disajikan pada sebagai berikut.

4.5.1 Model Regresi Linier Berganda

Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer *SPSS for Windows* versi 20. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program *SPSS* selengkapnya ada pada lampiran dan selanjutnya diringkas sebagai berikut :

Tabel 4. 13 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
(Constant)	8.764	2.244			3.906	.000
1						
Transparansi	.710	.049	.888		8.466	.000
Akuntabilitas	.014	.108	.007		7.127	.000
Partisipasi Masyarakat	-.139	.054	-.141		4.566	.002
Kebijakan Desa	.000	.095	.000		1.004	.070

a. Dependent Variable: Y

Sumber : *output* SPSS lampiran regresi linier berganda,2022

Berdasarkan tabel 4.13 model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi bentuk standar sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Pemberdayaan Masyarakat

X₁ = Transparansi

X₂ = Akuntabilitas

X₃ = Partisipasi Masyarakat

X₄ = Kebijakan Desa

$$Y = 8.764 + 0.710X_1 + 0.014X_2 - 0.139X_3 + 0.000X_4 + e$$

Persamaan regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 8,764 dapat diartikan bahwa apabila variabel independen dianggap konstan atau tetap maka variabel dependen juga bernilai positif.
2. Koefesien regresi linier berganda pada variabel transparansi menunjukkan angka positif sebesar 0,710. Hal ini berarti bahwa variabel transparansi dalam pengelolaan dana desa bernilai positif dan signifikan artinya berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
3. Koefesien regresi linier berganda pada variabel akuntabilitas menunjukkan angka positif sebesar 0,014. Hal ini berarti bahwa variabel akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa bernilai positif dan signifikan artinya berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
4. Koefesien regresi linier berganda pada variabel partisipasi masyarakat menunjukkan angka negatif sebesar -0,139. Hal ini berarti bahwa variabel partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa bernilai negatif dan signifikan artinya berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
5. Koefesien regresi linier berganda pada variabel kebijakan desa menunjukkan angka positif sebesar 0,00. Hal ini berarti bahwa variabel kebijakan desa bernilai positif dan signifikan artinya berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

4.5.2 Uji t

Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial dan individual terhadap variabel terikat. Adapun kriteria yang digunakan dalam menguji statistik t yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui nilai $\alpha = 0,05$, $n = 105$, $k = 3$, sehingga bila dimasukkan ke rumus menjadi $0,05/2 ; 105 - 3 - 1 = 0,025 ; 101$. Pada distribusi nilai t_{tabel} df nya 101 dan 0,025 sebesar 1,983. Berikut adalah hasil perhitungan uji t:

Tabel 4. 14 Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.764	2.244		3.906	.000
1 Transparansi	.710	.049	.888	8.466	.000
Akuntabilitas	.014	.108	.007	7.127	.000
Partisipasi Masyarakat	-.139	.054	-.141	4.566	.002
Kebijakan desa	.000	.095	.000	1.004	.070

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil output SPSS diatas pada tabel 4.14 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh transparansi (X_1) dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) memiliki t_{hitung} 8,466 lebih besar dari t_{tabel} 1,983 dan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak, maka terdapat pengaruh signifikan secara parsial

antara variabel transparansi (X_1) dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

2. Pengaruh akuntabilitas (X_2) dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) memiliki t_{hitung} 7,127 lebih besar dari t_{tabel} 1,983 dan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak, maka terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel akuntabilitas (X_2) dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
3. Pengaruh partisipasi masyarakat (X_3) dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) memiliki t_{hitung} 4,566 lebih besar dari t_{tabel} 1,983 dan tingkat signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak, maka terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel partisipasi masyarakat (X_3) dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
4. Pengaruh kebijakan desa (X_4) terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) memiliki t_{hitung} 1,004 lebih kecil dari t_{tabel} 1,983 dan tingkat signifikansi 0,070 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H_a ditolak dan H_0 diterima, maka tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel kebijakan desa (X_4) terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

4.6 Uji Kebaikan Model

4.6.1 Uji F

Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama diuji dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan regresi secara bersama-sama diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	728.918	4	182.229	12.538	.000 ^b
	Residual	265.882	100	2.659		
	Total	994.800	104			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

Sumber : data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.15 pengujian dari pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji F, hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai $F_{hitung} = 12,538$ dengan signifikansi sebesar 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 maka dapat diperoleh nilai signifikansi tersebut $< 0,05$. Hal ini berarti bahwa secara simultan variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kebijakan desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

4.6.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (adjusted R^2) untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat.

Tabel 4. 16 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.856 ^a	.733	.722	1.631

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

Sumber : data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan dari tabel 4.16 hasil perhitungan regresi koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) yang diperoleh sebesar 0,722. Hal ini berarti 72,2% pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dapat dipengaruhi oleh 4 variabel (Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Kebijakan Desa) dan 27,8% dipengaruhi oleh variabel lain.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Temuan analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Transparansi dalam pengelolaan uang desa merupakan salah satu ciri penting dari pengelolaan dana desa oleh perangkat desa Putri et al., (2021). Pemerintah desa memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, oleh karena itu pemerintah desa sebagai agen bertanggungjawab terhadap penyediaan informasi maupun penyajian laporan yang

lengkap mengenai apa saja yang dikerjakannya termasuk keuangan kepada pemerintah daerah maupun pusat dan juga kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa ditunjukkan dengan adanya kesediaan dan aksesibilitas dokumen, yang mana pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mengakses informasi mengenai penggunaan anggaran dana desa dengan mudah. Selain itu, dalam peran meningkatkan kebutuhan masyarakat dalam mengakses informasi tentang keuangan maupun non keuangan secara mudah, pemerintah desa menggunakan media lain untuk memberikan informasi-informasi penting kepada masyarakat.

Berkaitan dengan transparansi, pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan sehingga terdapat keterbukaan proses antara pemerintah desa dengan masyarakat. Dijalankannya transparansi dalam pengelolaan dana desa akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pihak prisipal terhadap pemerintah desa sebagai agen. Semakin terbuka suatu aparatur desa kepada masyarakatnya, maka pengelolaan dana desa akan semakin baik sehingga nantinya pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan dari dana desa dapat terlaksana Ardiyanti, (2019).

Hubungan penelitian ini dengan teori agency sebagai landasan teori yang digunakan, dimana dalam suatu hubungan antara agen dan principal memiliki kepentingan masing-masing. Dalam hal ini pemerintah pusat selaku principal menginginkan penyaluran dana desa dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat dengan semaksimal mungkin sehingga tujuan untuk pemberdayaan masyarakat

tercapai, sedangkan pemerintah desa selaku agen dalam mengelola dana desa cenderung mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan untuk meningkatkan nilai suatu organisasi/pemerintah sehingga pengelolaan dana desa dilakukan dengan seminimal mungkin. Maka dalam pengelolaan dana desa perlu adanya transparansi agar terhindar dari penyalahgunaan penyusunan dalam mengelola anggaran dana desa, sehingga dana desa yang tersalurkan menjadi efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk pemberdayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Putri et al., (2021), Marta et al., (2021).

4.7.2 Pengaruh Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Berdasarkan temuan penelitian dan hipotesis yang diuji, akuntabilitas pengelolaan uang desa berpengaruh baik dan substansial terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan uang desa merupakan tanggung jawab yang sangat penting dari pemerintah daerah.

Pengelolaan dana desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa Ardiyanti, (2019). Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas ini dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan adanya pembuatan laporan mengenai rincian penggunaan keuangan desa kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan pemerintah desa dengan tujuan agar

masyarakat mengetahui kondisi keuangan desa dan sebagai upaya pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.

Hubungan penelitian ini dengan teori agency sebagai landasan teori yang digunakan, dimana akuntabilitas berperan untuk mengurangi konflik yang terjadi antara agen dengan principal. Dengan akuntabilitas, kinerja pemerintah desa sebagai agen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terstruktur, maka penyelewengan terhadap dana desa dapat diminimalisir sehingga (agen) dapat mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan dalam pengelolaan dana desa kepada (principal) sebagai pemberi mandat dilakukan dengan baik. Maka penerapan akuntabilitas atau pertanggungjawaban oleh aparat desa dalam pengelolaan dana desa akan memberikan dampak hasil yang optimal dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yupita & Juita, (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian sebelumnya juga telah dilakukan oleh Syafi'i et al., (2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat masyarakat.

4.7.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Berdasarkan temuan penelitian dan hipotesis yang diuji, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan

secara statistik terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Hal ini menunjukkan bahwa mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan uang desa merupakan tanggung jawab penting dari perangkat desa.

Salah satu upaya dalam mensejahterakan masyarakat adalah dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan merupakan tahapan-tahapan dalam kegiatan pemberdayaan itu sendiri. Tanpa partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, maka pemberdayaan tidak dapat berjalan secara optimal, sehingga hal tersebut akan terjalin interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang mana dapat mendorong timbulnya hubungan yang positif antara pemerintah dengan masyarakat. Adapun bentuk dari upaya partisipasi masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa ini adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan penyusunan penggunaan dana desa, diikutsertakannya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pelestarian program desa, diikutsertakannya masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelaksanaan anggaran dana desa, serta masyarakat diberi kebebasan untuk memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan program desa. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam pengelolaan dana desa maka pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Hubungan penelitian ini dengan teori agency sebagai landasan teori yang digunakan, dimana partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara pihak agen dengan principal,

konflik keagenan tersebut berupa adanya asimetri informasi. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan partisipasi masyarakat yang berperan aktif terhadap program yang dijalankan principal untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2021), Marta et al., (2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

4.7.4 Pengaruh Kebijakan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil analisis dan hasil hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa kebijakan desa tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan desa yang diambil oleh pemerintah desa tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan desa kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya untuk kesejahteraan masyarakat salah satunya melakukan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan dana yang tersedia Sengaji & Asyik, (2018). Dana desa merupakan faktor yang dapat menentukan terlaksananya ide-ide pembangunan Sengaji & Asyik, (2018). Kurang tepatnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa yang sesuai dengan potensi maka pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat

menjadi kurang efektif dan efisien. Kebijakan desa kajian ini juga menentukan bahwa jika ketersediaan uang anggaran desa dan kewenangan desa dapat dikelola secara efektif, maka pembangunan desa yang tepat dapat tercapai. Karena pemberdayaan masyarakat menuntut kewenangan baik dari pemerintah desa sebagai kepala perencanaan pembangunan maupun masyarakat sebagai sumber gagasan pembangunan, maka kebijakan ini diambil dengan suara bulat oleh seluruh masyarakat tanpa ada tekanan dari pemerintah desa Emylia, (2019). Sehingga diharapkan prioritas pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Penerapan agency theory dalam hal ini adalah kebijakan desa dalam melaksanakan program pengelolaan dana desa tidak dapat menjadi dorongan bagi pemerintah terhadap pengambilan keputusan secara objektif dalam peningkatan kebutuhan masyarakat, hal ini berarti masih terdapat benturan antara kepentingan pemerintah desa dengan masyarakat dalam pelaksanaannya karena jika keputusan dilakukan secara objektif melihat kebutuhan masyarakat maka tingkat pemberdayaan semakin tinggi dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Syafi'i et al., (2018) yang menyatakan bahwa kebijakan desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi hasil dari studi ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kebijakan desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Asyik, (2019).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaruh transparansi (X_1) dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) memiliki t_{hitung} 8,466 lebih besar dari t_{tabel} 1,983 dan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak, maka terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel transparansi (X_1) dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
2. Pengaruh akuntabilitas (X_2) dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) memiliki t_{hitung} 7,127 lebih besar dari t_{tabel} 1,983 dan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak, maka terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel akuntabilitas (X_2) dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
3. Pengaruh partisipasi masyarakat (X_3) dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) memiliki t_{hitung} 4,566 lebih besar dari t_{tabel} 1,983 dan tingkat signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak, maka terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel partisipasi masyarakat (X_3) dalam pengelolaan dana desa

terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

4. Pengaruh kebijakan desa (X_4) terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) memiliki t_{hitung} 1,004 lebih kecil dari t_{tabel} 1,983 dan tingkat signifikansi 0,070 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H_a ditolak dan H_0 diterima, maka tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel kebijakan desa (X_4) terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

5,2 Keterbatasan Penelitian

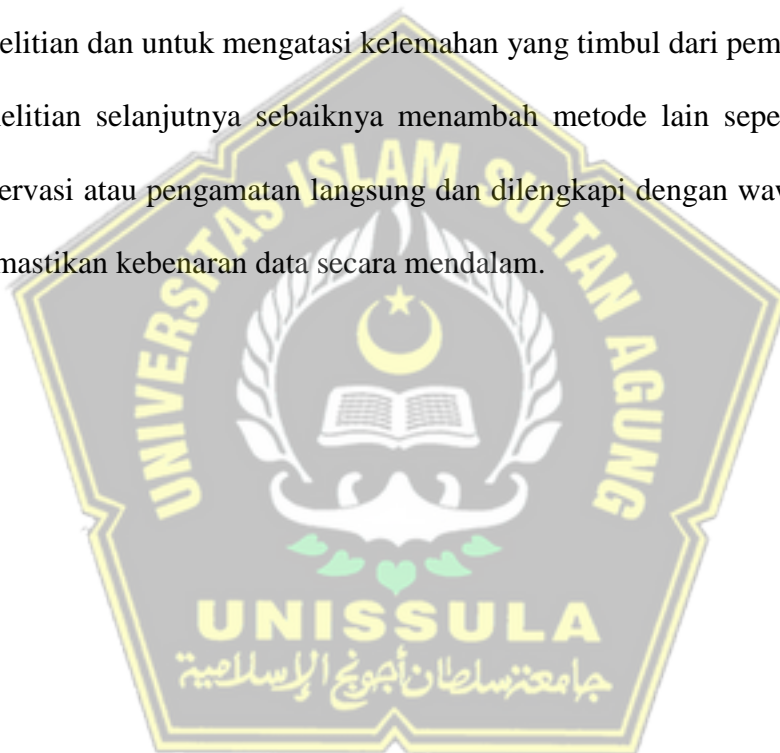
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dalam pelaksanaannya, keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya terbatas pada desa di kecamatan Bonang sehingga penelitian ini belum dapat digeneralisasi ke desa lain diluar kecamatan Bonang, dan responden penelitian ini juga hanya berfokus pada pengisian kuesioner yang dibagikan kepada perangkat desa, sehingga hanya berfokus pada pendapat pemerintah desa sebagai pengelola dana desa.
2. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan hanya dari kuesioner yang didasarkan pada persepsi responden, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan keterbatasan penelitian diatas maka untuk penelitian selanjutnya :

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan menambah populasi di kecamatan lain dan juga melibatkan masyarakat desa sebagai sampelnya sehingga memudahkan dalam menggeneralisasikan hasil penelitian dan untuk mengatasi kelemahan yang timbul dari pemerintah desa.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah metode lain seperti melakukan observasi atau pengamatan langsung dan dilengkapi dengan wawancara untuk memastikan kebenaran data secara mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, matia. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(2), 1–13. <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323>
- Ardiyanti, R. (2019). *pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat*.
- Asyik, N. F. (2019). pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal I;Mu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(9).
- Bahtiar, N. A. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–14.
- Dewi, F. G. R., & Sapari. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–20.
- Emylia, L. (2019). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kebijakan desa, kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(6).
- Endang Juliana. (2017). *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan*.
- Ferdinan, A. (2006). *metode penelitian manajemen*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2009). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan AKuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64. <https://rp2u.unsyiah.ac.id/index.php/welcome/prosesDownload/4727/4>
- Hamdani, M. (2016). Semnas fekon 2016. *Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Perspektif Agency Theory, 2000*, 50–57.
- Hikmah, L. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar

Kabupaten Banyuwangi. *Doctoral Dissertation, IAIN Jember.*

- Humaeroh, S., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2022). Analisis Transparansi dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Jurnal Moderat*, 8(February), 1–13.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi (Anggota IKAPI).
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (cet. 3). Bandung : hlm. 340-341.
- Marta, I. N. G., Nuryati, N. G. A. P., & Dewi, I. G. A. M. P. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa kediri kecamatan kediri kabupaten tabanan. *Majalah Ilmiah Untab*, 18(1), 128–135.
- Maryunani, & Setyanti, A. M. (2020). *Ekonomi perdesaan*.
- Pangesti, M. D., & S, A. I. (2020). *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi Kasus Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*. 1–23.
- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. P. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, 699–730.
- Sari, J. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi)*. 2(3). www.kemenkeu.go.id
- Sari, M. T., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(12).
- Sengaji, I., & Asyik, N. F. (2018). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan

Alokasi Dana Desa (ADD) dan kebijakan desa terhadap pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(3).
<https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>

- Shadrina, yoshi faza nur. (2020). *pengaruh akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat*.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan pemerintah desa berbasis partisipasi masyarakat* (Rev. ed.). Malang Setara Press.
- Sugista, R. A. (2017). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Empiris di Kabupaten Lampung Selatan)*. 01, 18.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syafi'i, R. I., Mahsuni, A. W. dan, & Afifudin. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang). *E-Jra*, 07(01), 32–45.
- Tahir, E. (2018). *Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Studi Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi)*.
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1).
- Wardani, D. K., & Utami, R. R. P. (2020). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 28(1), 35–50. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.376>
- Yupita, L., & Juita, V. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 56. <https://doi.org/10.33087/eksis.v11i1.176>